

**Tinjauan Konflik Sosial dan Dugaan Pencemaran dalam Operasional Peternakan
Ayam Broiler dari Perspektif Perusahaan Peternakan
(Studi Kasus PT Mitra Berlian Unggas Farm Singaparna Tasikmalaya)**

***Review of Social Conflict and Allegations of Pollution in Broiler Chicken Farming
Operations from the Perspective of Poultry Companies
(Case Study of PT Mitra Berlian Unggas Farm Singaparna Tasikmalaya)***

**Lilis Nurlina*, Marina Sulistiyati, M. Ali Mauludin, Unang Yunasaf,
Achmad Firman, Syahirul Alim, Nurul Ikhwan**

Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang

*Email: lilis.nurlina@unpad.ac.id

(Diterima 29-03-2026; Disetujui 07-07-2026)

ABSTRAK

Konflik lingkungan dalam industri peternakan merupakan isu kompleks yang melibatkan interaksi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik sosial yang ditimbulkan oleh tuduhan pencemaran udara pada sebuah perusahaan peternakan ayam broiler di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, dokumentasi internal perusahaan dan pelaporan dari instansi pemerintah daerah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perizinan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan regulasi, tetap muncul resistensi dari kelompok masyarakat tertentu yang didorong oleh motif ekonomi dan personal. Studi ini merekomendasikan pentingnya pendekatan komunikasi partisipatif, penguatan transparansi pengelolaan lingkungan, serta pelibatan aktor lokal dalam pembangunan sosial-ekologis yang berkeadilan.

Kata kunci: Konflik sosial, peternakan ayam, keadilan ekologis, pencemaran udara, persepsi masyarakat

ABSTRACT

Environmental conflicts in the livestock industry are complex issues involving interactions between communities, companies, and governments. This study aims to analyze the dynamics of social conflicts arising from allegations of air pollution at a broiler chicken farm in Singaparna, Tasikmalaya Regency, West Java. Using a qualitative case study approach, data was collected in-depth interviews with key informants, internal company documentation, and reports from local government agencies. Findings indicate that despite the company fulfilling all licensing and environmental monitoring obligations in accordance with regulations, resistance persists from certain community groups driven by economic and personal motives. This study recommends the importance of participatory communication approaches, strengthening transparency in environmental management, and involving local actors in socially and ecologically just development.

Keywords: Social conflict, chicken farming, ecological justice, air pollution, community perceptions

PENDAHULUAN

Industri peternakan modern di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan politik. Seiring meningkatnya skala produksi dan penggunaan teknologi modern seperti kandang tertutup (*closed house*) dengan sistem *exhaust fan*, muncul pula kompleksitas relasi antara pelaku usaha peternakan dan masyarakat sekitar. Salah satu bentuk tantangan sosial yang paling sering muncul adalah konflik akibat tuduhan pencemaran lingkungan, baik dalam bentuk polusi udara, pencemaran air, maupun gangguan terhadap kualitas hidup warga. Tuduhan ini tidak selalu berdasar pada temuan ilmiah atau bukti objektif, melainkan sering kali dipicu oleh persepsi masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan usaha atau merasa dirugikan dari segi sosial-ekonomi dan ekologis. Ketika masyarakat memandang keberadaan peternakan sebagai ancaman terhadap ruang hidup mereka, maka konflik pun menjadi sulit dihindari.

Konflik sosial dalam sektor peternakan seringkali berakar pada ketimpangan komunikasi, keterlibatan, dan distribusi manfaat antara perusahaan dan masyarakat lokal. Ketika proyek peternakan berjalan tanpa pendekatan partisipatif atau tanpa adanya forum musyawarah yang transparan sejak awal, maka celah bagi munculnya resistensi sosial menjadi terbuka lebar. Resistensi

ini bisa berbentuk penolakan halus hingga aksi demonstrasi terbuka, dan kerap kali dibungkus dalam narasi lingkungan hidup. Dalam beberapa kasus, isu pencemaran lingkungan dimanfaatkan sebagai alat tekanan sosial atau bahkan sebagai strategi negosiasi ekonomi oleh pihak-pihak tertentu (Nugraha & Rahmawati, 2019). Oleh karena itu, penanganan konflik di sektor peternakan tidak cukup hanya dengan memenuhi standar teknis atau legal-formal seperti UKL-UPL dan IMB, tetapi juga memerlukan pendekatan sosiologis yang memahami struktur sosial, pola komunikasi, dan kepentingan-kepentingan yang bermain di tingkat lokal.

Salah satu contoh nyata dari kompleksitas konflik ini terjadi di Desa Sukaharja, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Di wilayah tersebut, sebuah perusahaan peternakan ayam broiler modern menghadapi tuduhan pencemaran udara akibat sistem *exhaust fan* yang diklaim merusak tanaman pertanian warga sekitar. Meskipun perusahaan telah mengantongi izin lingkungan yang lengkap, termasuk dokumen UKL-UPL, IMB, serta laporan hasil laboratorium yang menyatakan kualitas udara masih dalam ambang batas aman, tetap saja muncul ketegangan sosial di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul bukan semata-mata bersifat teknis atau ilmiah, melainkan berkaitan erat dengan struktur sosial dan relasi kuasa di masyarakat. Oleh sebab itu, penting dilakukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana persepsi lingkungan dibentuk dan dimobilisasi dalam relasi sosial, serta bagaimana strategi komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan sebagai solusi berkelanjutan dalam menghadapi konflik sosial yang mengancam keberlanjutan usaha peternakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan secara mendalam dinamika konflik sosial dan isu pencemaran lingkungan yang dialami oleh PT Mitra Berlian Unggas Farm Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Studi kasus dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman konteks spesifik, kompleksitas peristiwa, dan interaksi sosial yang melatarbelakangi konflik antara perusahaan dan organisasi masyarakat setempat. Lokasi penelitian dilakukan secara terfokus di lingkungan operasional perusahaan, khususnya area yang menjadi pusat konflik dan wilayah masyarakat terdampak yang melakukan pengaduan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari perusahaan, hasil laboratorium kualitas udara, dokumen perizinan (UKL-UPL, IMB), berita acara mediasi, serta arsip komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini meliputi pihak manajemen perusahaan, tokoh masyarakat sekitar, dan perwakilan dari organisasi masyarakat (ormas) pelapor, serta aparat desa atau pemerintah kabupaten yang terlibat dalam proses mediasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, analisis dokumen, dan dilakukan observasi terbatas untuk mendapatkan gambaran sosial masyarakat sekitar perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran utuh dan objektif atas relasi antara isu pencemaran lingkungan yang dituduhkan, dengan realitas sosial-politik yang berkembang di masyarakat sekitar peternakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Sosial terhadap Isu Pencemaran

Isu pencemaran lingkungan yang dilayangkan oleh organisasi masyarakat Gasantana terhadap PT Mitra Berlian Unggas Farm Singaparna merupakan contoh nyata dari bagaimana isu lingkungan dapat dikonstruksi secara sosial. Tuduhan pencemaran udara akibat sistem *exhaust fan* kandang ayam broiler yang diklaim merusak produktivitas kebun masyarakat, tidak didukung oleh hasil temuan ilmiah yang valid. Dalam laporan uji laboratorium independen, kualitas udara di sekitar peternakan masih berada dalam ambang batas aman sesuai ketentuan lingkungan yang berlaku. Perusahaan juga telah memenuhi seluruh dokumen legalitas, seperti UKL-UPL, IMB, serta laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara berkala. Namun demikian, isu pencemaran terus diangkat oleh ormas sebagai sumber tekanan terhadap keberlangsungan usaha peternakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks sosial, pencemaran tidak selalu merujuk pada kondisi objektif atau ilmiah, tetapi bisa menjadi bagian dari wacana sosial yang dibentuk dan disebarluaskan oleh aktor-aktor tertentu.

Dalam perspektif sosiologi lingkungan, fenomena ini dapat dipahami melalui teori konstruksi sosial atas pencemaran (*social construction of pollution*). Pencemaran tidak hanya dipandang sebagai realitas fisik yang dapat diukur melalui instrumen ilmiah, tetapi juga sebagai realitas sosial yang diproduksi melalui narasi, simbol, dan kekuatan sosial-politik (Pellow, 2017). Suatu aktivitas industri bisa dianggap mencemari atau mengganggu, bukan karena ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut, tetapi karena narasi tentang bahaya atau kerugian yang berhasil dibentuk dan dipercaya oleh masyarakat (Kurniawan & Prabowo, 2017). Dalam kasus PT Mitra Berlian Unggas, isu pencemaran udara dijadikan representasi dari ketidakadilan sosial di mana sebagian masyarakat merasa tidak mendapat manfaat dari keberadaan perusahaan, dan karenanya memanfaatkan isu lingkungan sebagai sarana untuk menyuarakan resistensi, menuntut kompensasi, atau bahkan membuka ruang negosiasi ekonomi-politik.

Konflik seperti ini menggarisbawahi pentingnya membedakan antara pencemaran sebagai kondisi objektif dan pencemaran sebagai konstruksi sosial. Ketika wacana lingkungan digunakan sebagai alat tekanan, maka penanganan konflik tidak cukup hanya dengan menunjukkan bukti teknis atau legalitas administratif. Perusahaan perlu memahami konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya resistensi tersebut, termasuk persepsi ketimpangan manfaat, kurangnya komunikasi dua arah, serta ketegangan relasi kuasa antara masyarakat dan pelaku industri. Dalam hal ini, strategi yang lebih partisipatif dan dialogis menjadi penting, bukan hanya untuk meredam konflik, tetapi juga untuk membangun legitimasi sosial yang berkelanjutan. Pendekatan sosiologis membuka ruang bagi perusahaan untuk tidak sekadar bertahan dari tuduhan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi sosial yang lebih adil dan inklusif bagi komunitas lokal (Afrinalisari & Susilawati, 2020).

Konflik Sosial dan Kepentingan Ekonomi Lokal

Konflik sosial yang terjadi antara PT Mitra Berlian Unggas Farm Singapura dan ormas Gasantana tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Meskipun perusahaan telah memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi lokal dengan menyerap tenaga kerja dari kalangan warga sekitar yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas peternakan, ormas Gasantana justru tidak termasuk dalam struktur sosial-ekonomi lokal yang terdampak langsung secara positif. Ketika pihak perusahaan membuka kesempatan bagi anggota ormas untuk terlibat dalam kegiatan operasional, misalnya melalui penawaran pekerjaan sebagai tenaga keamanan, tawaran tersebut tidak diterima. Ironisnya, ormas tetap menuntut kompensasi berkala tanpa berkontribusi dalam kegiatan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang muncul bukan semata-mata berkaitan dengan kerusakan lingkungan sebagaimana diklaim, melainkan lebih bersifat struktural berakar pada ketidakpuasan terhadap akses ekonomi yang dianggap tidak merata.

Dalam kajian sosiologi lingkungan, konflik semacam ini dikategorikan sebagai *environmental distribution conflict*, yaitu konflik yang timbul akibat ketimpangan distribusi atas risiko dan manfaat pembangunan (Martínez-Alier, 2002). Dalam konteks ini, kelompok yang merasa tersisih atau tidak mendapatkan bagian dari manfaat ekonomi cenderung menggunakan isu pencemaran lingkungan sebagai instrumen legitimasi untuk memperkuat tuntutan mereka. Narasi lingkungan menjadi sarana strategis untuk mengartikulasikan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-ekonomi yang dirasakan tidak adil. Hal ini diperkuat oleh ketidakhadiran pelibatan aktif kelompok tersebut dalam proses awal pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan peternakan. Dengan demikian, konflik yang terjadi bukan hanya mengenai udara bersih atau kualitas lingkungan, melainkan tentang siapa yang berhak atas keuntungan dari investasi peternakan dan bagaimana mekanisme distribusi itu dirancang secara sosial.

Dinamika ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan inklusif dalam pembangunan agribisnis peternakan, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki struktur sosial yang kompleks. Upaya pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek teknis dan legal-formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan sosial dan distribusi manfaat ekonomi secara proporsional (Pertiwi et al., 2022). Keterlibatan aktif semua aktor lokal, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan secara sosial, menjadi kunci untuk membangun legitimasi dan keberterimaan sosial terhadap proyek peternakan. Tanpa mekanisme partisipatif yang adil, konflik distribusi semacam ini tidak hanya akan menghambat operasional perusahaan, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan sosial jangka panjang yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, pembangunan peternakan berkelanjutan harus disertai strategi sosial yang mampu mengelola distribusi manfaat secara inklusif dan responsif terhadap dinamika lokal.

Manipulasi Isu Lingkungan sebagai Strategi Kekusaan

Strategi yang dijalankan oleh ormas Gasantana dalam membingkai isu lingkungan sebagai alat konflik menunjukkan adanya praktik ekologi politik (*political ecology*), yaitu pendekatan yang menyoroti bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan sumber daya alam saling terkait dalam konflik sosial. Dalam hal ini, lingkungan tidak lagi semata-mata menjadi ruang ekologis, tetapi telah menjadi arena kontestasi sosial dan politik (Burns et al., 2023). Di banyak negara berkembang, isu-isu lingkungan sering digunakan secara strategis oleh aktor non-negara untuk menegosiasikan kekuasaan, memperluas pengaruh sosial, atau memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi (Robbins, 2019). Dalam kasus PT Mitra Berlian Unggas Farm, klaim pencemaran yang tidak didukung oleh bukti ilmiah digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan tekanan terhadap perusahaan melalui jalur mediasi pemerintahan hingga pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Pendekatan semacam ini mengindikasikan bahwa konflik yang terjadi tidak bersifat ekologis murni, melainkan merupakan hasil dari konfigurasi sosial-politik yang kompleks. Dalam konstruksi ini, lingkungan dijadikan simbol dan narasi yang sarat kepentingan. Narasi pencemaran dipakai bukan untuk menyuarakan kepedulian ekologis secara tulus, melainkan sebagai instrumen politik untuk memaksakan posisi tawar terhadap perusahaan. Lebih lanjut, aktor seperti ormas Gasantana tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat lokal yang mayoritas bekerja di sektor peternakan tersebut. Justru, keberadaan ormas ini menunjukkan adanya perebutan kontrol atas narasi dan ruang pengaruh sosial di tingkat lokal. Ketika klaim lingkungan digunakan secara manipulatif, maka ruang dialog menjadi kabur, dan solusi berbasis bukti menjadi sulit diwujudkan.

Fenomena ini memberikan tantangan serius bagi pengembangan peternakan berkelanjutan. Sebab, meskipun perusahaan telah menjalankan praktik yang legal dan bertanggung jawab secara ekologis, mereka tetap rentan terhadap serangan narasi yang dimotori oleh aktor yang memiliki kuasa sosial. Dalam jangka panjang, situasi seperti ini dapat mengganggu stabilitas sosial, memicu ketidakpercayaan publik, dan memperburuk relasi antara pelaku usaha dan komunitas. Oleh karena itu, pengelolaan konflik di sektor peternakan tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis-lingkungan, tetapi juga pendekatan sosial-politik yang mampu memahami dan merespons dinamika kekuasaan di tingkat lokal. Perusahaan perlu membangun strategi komunikasi dan keterlibatan masyarakat yang mampu membendung dominasi narasi sepihak serta memulihkan legitimasi sosial di tengah situasi konflik yang dimediasi oleh kepentingan tertentu.

Keadilan Lingkungan dan Ketimpangan Representasi

Operasional PT Mitra Berlian Unggas Farm Singapura, realitas sosial menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat lokal justru mendukung keberadaan perusahaan. Lebih dari 70% penduduk desa terlibat secara langsung dalam aktivitas peternakan, baik sebagai tenaga kerja tetap maupun pekerja harian, sehingga perusahaan menjadi salah satu pilar ekonomi utama bagi desa tersebut. Namun demikian, dukungan dari kelompok mayoritas ini seringkali tertutupi oleh narasi kelompok minoritas yang lebih vokal, seperti ormas Gasantana. Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam hal *representasi suara*, di mana kelompok dengan akses komunikasi yang lebih kuat mampu membentuk opini publik, meskipun tidak merepresentasikan kepentingan komunitas lokal yang terdampak secara langsung.

Kerangka *environmental justice* atau keadilan lingkungan, terdapat dua prinsip utama yang harus dipenuhi, yaitu keadilan distribusi dan keadilan procedural. Keadilan distribusi merujuk pada pemerataan manfaat dan beban lingkungan, sementara keadilan prosedural menuntut keterlibatan yang adil dalam proses pengambilan keputusan (Saputro et al., 2023). Dalam kasus ini, meskipun manfaat ekonomi dari perusahaan didistribusikan secara signifikan kepada warga lokal, hak mereka untuk merepresentasikan diri dalam wacana publik dan pengambilan keputusan justru terpinggirkan. Ormas yang berasal dari luar komunitas desa mengambil alih ruang representasi, memposisikan diri sebagai aktor dominan dalam konflik, padahal mereka tidak mengalami dampak sosial-ekonomi secara langsung dari keberadaan peternakan tersebut. Ketimpangan representasi menciptakan ilusi yang berakhir mendorong opini dan konflik (Nugraha, & Rahmawati, 2019).

Fenomena dominasi suara oleh aktor luar yang tidak memiliki akar sosial-ekonomi di wilayah terdampak merupakan bentuk delegitimasi terhadap prinsip keadilan lingkungan. Kondisi ini berpotensi memperparah konflik sosial, memperlemah kohesi komunitas, dan merusak relasi antara masyarakat lokal dengan aktor pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk membangun

mekanisme partisipatif yang memastikan bahwa masyarakat terdampak langsung memiliki ruang yang memadai untuk menyuarakan pendapat mereka dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan lingkungan. Proses partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai sarana demokratisasi, tetapi juga sebagai strategi meredam konflik berbasis misrepresentasi (Yantitama, & Wahyudi, 2024). Ke depan, keberhasilan pembangunan peternakan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan legalitas teknis, tetapi juga oleh keberhasilan membangun struktur sosial yang adil, inklusif, dan representatif dalam setiap pengambilan keputusan.

Peran Negara dan Legitimasi Formal Perusahaan

Secara legal-formal, PT Mitra Berlian Unggas Farm Singaparna telah memenuhi seluruh ketentuan administratif dan perizinan lingkungan yang diwajibkan oleh pemerintah. Dokumen penting seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta laporan berkala tentang kualitas udara telah disusun dan disahkan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban lingkungannya dari perspektif regulasi. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan administratif ini tidak serta-merta menjamin terbentuknya penerimaan sosial dari masyarakat. Konflik yang muncul memperlihatkan adanya kesenjangan antara legalitas dan legitimasi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan dokumen legal belum tentu diiringi oleh penerimaan yang kuat dari masyarakat, terutama bila proses penyusunan dan implementasinya tidak melibatkan warga secara bermakna.

Salah satu celah utama yang memperlebar konflik adalah lemahnya pengawasan sosial dan ketiadaan mekanisme komunikasi partisipatif sejak awal pendirian usaha. Dalam banyak kasus di Indonesia, implementasi kebijakan perizinan lingkungan masih cenderung bersifat teknokratis dan minim dialog sosial. Hal ini menciptakan ruang kosong yang kemudian diisi oleh narasi alternatif, termasuk oleh kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Dalam kasus PT Mitra Berlian Unggas Farm Singaparna, ketiadaan pendekatan dialogis dari awal membuka ruang spekulasi dan ketidakpercayaan. Pemerintah daerah, meskipun bersikap netral dalam merespons tuntutan yang tidak berdasar dari ormas, gagal menjalankan fungsi fasilitasi sosial yang mestinya menjadi bagian integral dari proses perizinan dan operasionalisasi industri peternakan.

Dari perspektif sosiologi lingkungan, situasi ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum dan kepatuhan administratif. Legitimasi sosial merupakan dimensi penting yang harus dibangun melalui proses dialogis, partisipatif, dan transparan (Nurrochmat, 2017). Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dampak menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menghindari konflik berkepanjangan (Safitri, 2016). Ketika masyarakat merasa diikutsertakan, didengar, dan dihargai, maka potensi resistensi dapat diminimalisir, dan stabilitas sosial di sekitar kawasan industri dapat lebih mudah terjaga. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu mengembangkan model *governance* lingkungan yang mengintegrasikan aspek teknis, hukum, dan sosial secara holistik demi terwujudnya pembangunan peternakan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Konflik lingkungan di perusahaan Mitra Berlian Unggas Farm Singaparna mencerminkan bahwa persoalan pencemaran tidak semata-mata merupakan isu teknis ekologis, melainkan juga persoalan sosial yang dikonstruksi oleh kepentingan tertentu. Melalui pendekatan sosiologi lingkungan, ditemukan bahwa tuduhan pencemaran lingkungan oleh ormas Gasantana lebih dilatarbelakangi oleh motif ekonomi dan ketimpangan akses terhadap manfaat usaha peternakan, bukan oleh fakta kerusakan lingkungan yang objektif. Hal ini diperkuat dengan tidak ditemukannya bukti pencemaran berdasarkan hasil uji laboratorium, serta telah dipenuhinya seluruh syarat legal-formal perusahaan seperti izin mendirikan bangunan dan dokumen UKL-UPL. Konflik ini menegaskan pentingnya keadilan distribusi (*distributional justice*) dan keadilan representatif (*representational justice*) dalam pengelolaan lingkungan peternakan. Maka dari itu, pengelolaan lingkungan dalam usaha peternakan tidak hanya harus berbasis legalitas, tetapi juga memperhatikan aspek partisipatif, sosial, dan politis. Pendekatan ini menjadi penting dalam mencegah terjadinya konflik berulang serta menjaga legitimasi sosial perusahaan di mata masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinalisari, K., & Susilawati, N. (2020). Resolusi konflik peternak itik dengan pemilik sawah dan masyarakat di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 3(2). <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i2.263>
- Burns, A. M., Chandler, G., Dunham, K. J., & Carlton, A. G. (2023). Data gap: Air quality networks miss air pollution from concentrated animal feeding operations. *Environmental Science & Technology*, 57(49), 20718–20725. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c06947>
- Kurniawan, T., & Prabowo, H. (2017). Mediasi Sosial dalam Konflik Agraria dan Lingkungan: Studi di Wilayah Peternakan Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(2), 134–148. <https://doi.org/10.24002/jps.v5i2.1045>
- Nugraha, M. A., & Rahmawati, D. (2019). Politik Lingkungan di Tingkat Lokal: Studi Tentang Narasi Ekologis dalam Konflik Agraria. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(2), 75–88. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.2.75-88>
- Nurrochmat, D. R. (2017). Governance Konflik Sumber Daya Alam. IPB Press.
- Pellow, D. N. (2017). What is Critical Environmental Justice? Polity Press. <https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1722591>
- Pertiwi, S. P., Muryani, C., & Utomowati, R. (2022). Hubungan kondisi sosial ekonomi peternak sapi terhadap kesadaran lingkungan di Kecamatan Musuk dan Tamansari, Kabupaten Boyolali. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 1(1), 47–59. <https://doi.org/10.20961/ijed.v1i1.63>
- Safitri, M. (2016). Kajian Sosial terhadap Implementasi Perizinan Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 3(1), 45–52.
- Saputro, R. D., Moeis, E., & Esti, R. N. (2023). Persepsi masyarakat terhadap dampak lingkungan peternakan ayam pedaging (studi kasus di Dusun Jatilengger, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *AVES: Jurnal Ilmu Peternakan*, 16(2), 29–34. <https://doi.org/10.35457/aves.v16i2.2752>
- Yantitama, Y., & Wahyudi, E. (2024). Penyelesaian sengketa lingkungan antara warga dan usaha ternak ayam di Desa Karangjati, Ngawi. *Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Pidana*, 4(5). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2204>